



PENDAMPINGAN PERANCANGAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERDASARKAN SAK ETAP DALAM PELAPORAN KEUANGAN PADA BUMDES TIRTA MANDIRI, DESA PONGGOK, KLATEN

Abstraksi

Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat (abdimas) ini adalah untuk mendampingi penyusunan kebijakan akuntansi bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri. Kebijakan akuntansi disesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP). Kegiatan abdimas dilakukan pada periode Januari sampai Juli 2019. Untuk menyusun kebijakan akuntansi, kami melakukan studi pendahuluan, wawancara dengan narasumber dan pelaku usaha BUMDes dan *Forum Grup Discussion* (FGD). Hasil kegiatan berupa kebijakan akuntansi yang sesuai dengan SAK ETAP seperti yang diamanatkan Peraturan Desa dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMDes. Kebijakan akuntansi tersebut memuat karakteristik umum pelaporan keuangan, prinsip dasar pelaporan keuangan, kebijakan akuntansi penting dan bentuk laporan keuangan yang dihasilkan oleh BUMDes Tirta Mandiri.

Kata Kunci: kebijakan akuntansi, BUMDes, SAK ETAP

Andy Prasetiawan Hamzah¹,
Akhmad Priharjanto*², Dyah
Purwanti³

Abstract

The purpose of this community service activity is to prepare of accounting policies for the Tirta Mandiri Village-owned Enterprises (BUMDes). Accounting policies are referred to Financial Accounting Standards for Entities with Less Public Accountability (ETAP). Community service activities are carried out in the period of January to July 2019. To compile accounting policies, we conduct preliminary studies, interviews with related party and Group Discussion Forums (FGD). The result is an accounting policies in accordance with SAK ETAP as mandated by Village Regulations and the BUMDes Statutes/By-Laws. The accounting policy contains general characteristics of financial reporting, basic principles of financial reporting, important accounting policies and forms of financial reports produced by BUMDes Tirta Mandiri.

Keywords: accounting policy, village-owned enterprise, SAK ETAP

^{1) 2) 3)} Akuntansi, Politeknik Keuangan
Negara STAN

Article history

Received : 15-08-2019

Revised : 01-10-2019

Accepted : 10-10-2019

*Corresponding author

Email : apri@pknstan.ac.id

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa merupakan organisasi baru yang terbentuk atas dasar disahkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai dasar atas program Nawacita Presiden Indonesia ke 7 Joko Widodo yang membangun ekonomi lewat pinggiriran. Badan Usaha Milik Desa Ponggok Tirta Mandiri merupakan salah satu BUMDes dari sekian banyak BUMDes yang ada di Indonesia. BUMDes ini sebelumnya berbentuk koperasi. BUMDes Ponggok Tirta Mandiri didirikan pada tanggal 15 Desember 2009 yang merupakan milik dari Pemerintahan Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.

Desa Ponggok memiliki sumber daya alam yang sangat potensial berupa umbul (mata air), tanah yang subur dan sungai-sungai yang mengalirkan air dari umbul. Dengan adanya potensi yang sangat besar ini, Bapak Junaedhi Mulyono yang baru saja menjadi Kepala Desa pada tahun 2009 langsung berinovasi untuk mendirikan badan usaha pengelolaan sumber aset desa untuk dijadikan modal kekayaan desa. Dengan dukungan dari jajaran pemerintahan Desa Ponggok dan Badan Permusyawaratan Desa sehingga dibentuklah Badan Usaha Milik Desa Ponggok yang dikelola oleh pemerintah Desa Ponggok pada awalnya. Awal berdiri BUMDes hanya bergerak di bidang simpan pinjam saja yang melayani simpan pinjam kepada para petani di Desa Ponggok pada khususnya dan kepada para masyarakat Desa Ponggok pada umumnya. Setelah dengan berdirinya pabrik air minum Aqua di Desa Ponggok, masyarakat Desa Ponggok semakin meningkat tingkat kesejahteraannya karena P.T. Aqua memberi porsi 40% untuk total dari jumlah karyawan untuk diisi dari para pemuda-pemuda Desa Ponggok yang ingin bekerja di pabrik tersebut. Namun, dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan semakin meningkat juga tingkat konsumsi masyarakat. Meningkatnya tingkat konsumsi ini tidak diiringi dengan tingginya tingkat pendapatan masyarakat, sehingga memaksa masyarakat untuk melakukan simpan pinjam kepada bank atau perorangan.

Tujuan pendirian BUMDes Tirta Mandiri adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Ponggok secara mandiri. Keberadaan BUMDes juga mendorong tumbuhnya kegiatan produktif masyarakat dengan dibukanya kios-kios kuliner untuk masyarakat di lokasi obyek wisata Umbul Ponggok, serta menumbuhkembangkan iklim investasi bagi masyarakat, karena BUMDes sudah berhasil mendorong masyarakat Ponggok untuk melakukan penyertaan modal sehingga masyarakat mendapat bagi hasil dari pengelolaan usaha BUMDes. Inilah bukti dari usaha dan kerja keras yang dibangun oleh Pemerintah Desa Ponggok, BUMDes dan masyarakat sehingga BUMDes merupakan lembaga yang

berpengaruh besar dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Desa Ponggok bisa membuktikan keberhasilan ini dan akan terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan yang dihasilkan dari usahanya sendiri melalui BUMDes sehingga Ponggok betul-betul bisa menjadi Desa Mandiri.

Pada awal pendiriannya, BUMDes TIRTA MANDIRI mendapatkan modal awal dari Pemerintah Desa Ponggok sebesar Rp 100.000.000, (Seratus Juta Rupiah). Dengan modal tersebut BUMDes diharapkan mampu berkembang dan kedepannya BUMDes diharapkan dapat mandiri dengan unit-unit usahanya. Dan hal ini dibuktikan dengan berkembangnya unit-unit usaha yang dikelola oleh BUMDes TIRTA MANDIRI serta meningkatnya aset yang dimiliki. Seiring dengan pesatnya perkembangan usaha BUMDes Tirta Mandiri, saat ini BUMDes memiliki berbagai unit kegiatan usaha, yang meliputi: (1) Umbul Ponggok, (2) Ponggok Ciblon, (3) Toko Desa, (4) *Homestay*, (5) Study Desa, (6) Kolam Ikan, (7) Penyewaan Aula Gedung, (8) Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), (9) Penyewaan Kios, (10) Kredit Pinjaman, (12) Pengadaan Air Bersih, (13) Kelompok Unit Kantor.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMDes Tirta Mandiri berpedoman pada Peraturan Desa (Perdes) No. 06 tahun 2009 yang diperbaharui dengan Perdes 6 tahun 2018 dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMDes Tirta Mandiri. Selain itu, BUMDes juga memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Ponggok Nomor 18 / IX / Tahun 2018. Dan untuk mempertegas pendelegasian kewenangan pengelolaan aset desa tetapkan Keputusan Kepala Desa Ponggok Nomor 19 / IX / Tahun 2018 Tentang Status Penggunaan Aset Desa Yang Dikelola Badan Usahan Milik Desa Tirta Mandiri Periode 2016–2019.

Dalam Perdes No. 6 tahun 2018 dan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri mewajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang disusun dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP). Namun Dikarenakan keterbatasan pada kapasitas sumber daya manusia dan belum memadainya support aplikasi terkait standar akuntansi tersebut, BUMDes Tirta Mandiri mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Berdasarkan permasalahan tersebut, Direktur BUMDes Tirta Mandiri mengirimkan surat ke Politeknik Keuangan Negara STAN nomor 01/BUMDes/1/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang permintaan pengiriman tim pendampingan dalam pembuatan laporan keuangan yang baik dan sesuai standar akuntansi. Berdasarkan hasil survey awal dan analisis atas data dan fakta di lapangan, penyusunan laporan

keuangan BUMDes Tirta Mandiri masih menggunakan cara penyusunan yang sederhana dan sudah menggunakan aplikasi akuntansi. Pencatatan transaksi tiap unit dilakukan oleh Bendahara dengan aplikasi yang sudah terpasang di komputer. Namun karena keterbatasan sumber daya yang mahir akuntansi dan disiplin melakukan perekaman transaksi ke aplikasi akuntansi, mengakibatkan laporan yang dihasilkan tidak lengkap, klasifikasi akun yang belum sesuai standar akuntansi yang berlaku, serta format laporan keuangan tidak baku. Penyajian akun-akun belum mengikuti Standar Akuntansi yang berlaku. Hal tersebut disebabkan BUMDes belum memiliki Pedoman Kebijakan Akuntansi. Sehingga kami menyimpulkan adanya kebutuhan untuk penyusunan kebijakan akuntansi yang digunakan sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan usaha milik desa (atau diakronimkan menjadi BUMDes) merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat. Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

BUMDes merupakan sebuah jenis usaha yang dikelola serta diprioritaskan untuk perkembangan desa. BUMDes ini sebenarnya merupakan salah satu langkah dari pemerintah pusat dalam upaya pemerataan pembangunan ekonomi. Dengan pemerataan ini diharapkan tidak akan terjadi lagi kesenjangan antara masyarakat di perkotaan dan pedesaan. Selain itu, diharapkan masyarakat pedesaan bisa memiliki kemandirian dalam memajukan desanya. Dengan adanya BUMDes ini diharapkan bisa melahirkan industri-industri kreatif yang mampu memberdayakan masyarakat desa tersebut. Pada akhirnya tidak akan lagi ada masyarakat pedesaan yang merantau ke kota hanya untuk mencari pekerjaan.

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan

keuangan. Ketika suatu pernyataan standar akuntansi keuangan (psak) secara spesifik berlaku untuk suatu transaksi, peristiwa atau kondisi lain, kebijakan akuntansi yang diterapkan pos tersebut menggunakan PSAK tersebut. Dalam hal tidak ada PSAK yang secara spesifik berlaku untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain, maka manajemen menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang relevan dan andal.

Entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang serupa, kecuali suatu PSAK secara spesifik mengatur atau mengizinkan pengelompokan pos-pos dengan kebijakan akuntansi yang berbeda adalah hal yang tepat. Jika suatu PSAK mengatur atau mengizinkan pengelompokan tersebut, maka kebijakan akuntansi yang tepat dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompok. Kebijakan akuntansi meliputi pilihan prinsip-prinsip akuntansi, dasar-dasar, konvensi, peraturan dan prosedur yang digunakan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pertimbangan pemilihan kebijakan akuntansi disesuaikan dengan kondisi entitas. Tujuan penyusunan kebijakan akuntansi adalah untuk menggambarkan realitas ekonomi perusahaan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan hasil operasi.

PSAK ETAP

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

SAK ETAP bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberi kemudahan akses ETAP kepada pendanaan dari perbankan. SAK ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis; mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP; bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun.

SAK ETAP digunakan untuk menyajikan informasi keuangan dari entitas yang memiliki transaksi keuangan sederhana dan tidak kompleks. Hal tersebut menguatkan esensi pentingnya standar akuntansi yang tidak kompleks, yaitu SAK ETAP. Informasi akuntansi yang diatur dalam SAK ETAP meliputi: (1) Kas dan Setara Kas, (2) Piutang Usaha

dan Piutang Lainnya, (3) Persediaan, (4) Properti Investasi, (4) Aset Tetap, (5) Aset Tidak Berwujud, (6) Utang Usaha dan Utang Lainnya, (7) Kewajiban Pajak, (8) Kewajiban diestimasi, (9) Ekuitas. Sementara, Laporan Laba Rugi memuat informasi pokok, minimal memuat: (1) pendapatan, (2) beban keuangan, (3) bagian keuntungan atau kerugian dari metode ekuitas, (4) beban pajak, dan (5) laba atau rugi neto. SAK ETAP tidak mengatur tentang pengaturan pos laba rugi komprehensif.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian masyarakat pada pendampingan penyusunan pedoman kebijakan akuntansi BUMDes Tirta Mandiri dilakukan pada periode Januari hingga Juni 2019. Kegiatan abdimas ini berlokasi di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.

Untuk mencapai tujuan kegiatan abdimas, kami mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Survey Pendahuluan

Pada akhir Januari 2019, Tim melakukan kunjungan pertama kali ke Desa Ponggok. Dalam kunjungan pertama ini, Direktur BUMDes memberikan penjelasan atas maksud dari permintaan bantuan penyusunan laporan keuangan BUMDes yang berdasarkan SAK ETAP. Selain penjelasan tersebut, Tim mendapatkan perkembangan BUMDes dari sejak awal berdiri hingga posisi pada tahun berjalan. Survey pendahuluan ini menjadi bagian pengenalan awal dengan profil bisnis BUMDes Tirta Mandiri dan jajaran manajemen yang menangani kegiatan operasional BUMDes.

2. Survey Lanjutan, Pengumpulan Dokumen dan Wawancara

Kegiatan berikutnya adalah Tim melakukan pengumpulan dokumen yang relevan dalam kegiatan pelaporan keuangan BUMDes. Kegiatan ini parallel dengan kunjungan ke setiap unit usaha BUMDes sekaligus wawancara dengan pegawai yang menangani bagian pelaporan. Hasil kegiatan ini adalah kami memperoleh dokumen pelaporan tiap unit usaha baik dalam bentuk laporan hardcopy maupun arsip data komputer. Selanjutnya kami melakukan analisis dokumen, dilengkapi dengan hasil wawancara dengan pegawai BUMDes yang terkait dengan pelaporan keuangan.

3. Focus Group Discussion (FGD) Kondisi Pelaporan BUMDes Tirta Mandiri yang sedang Berjalan dan Analisis Kebutuhan

Menindaklanjuti hasil pengumpulan data baik secara dokumen dan wawancara, Tim melakukan diskusi dipimpin dengan bagian akuntansi BUMDes untuk membahas temuan

tersebut sekaligus mengkonfirmasi aspek-aspek yang sepenuhnya belum kami pahami. Pelaporan keuangan menggunakan aplikasi akuntansi yang sudah terpasang pada computer masing-masing unit usaha. Laporan keuangan menunjukkan format laporan yang belum sesuai standar akuntansi, akun-akun laporan keuangan yang masih belum lengkap dengan klasifikasi akun tidak informatif dan tidak sesuai standar akuntansi. Kondisi pelaporan tersebut didukung dengan keterbatasan sumber daya manusia yang menangani akuntansi. Tingginya tingkat perputaran pegawai dan kompetensi yang tidak memadai mengakibatkan inkonsistensi input ke aplikasi akuntansi. Selain itu, BUMDes Tirta Mandiri belum memiliki pedoman kebijakan akuntansi berdasarkan standar akuntansi yang relevan, sehingga pedoman dalam menyusun laporan keuangan belum ada. Oleh karena itu, Tim menentukan prioritas analisis kebutuhan dalam pelaporan keuangan adalah merancang kebijakan akuntansi untuk BUMDes Tirta Mandiri yang sesuai dengan SAK ETAP.

4. Pendampingan Perancangan Kebijakan Akuntansi berdasar SAK ETAP

Langkah pertama dalam perancangan kebijakan akuntansi berdasar SAK ETAP adalah melakukan analisis laporan keuangan BUMDes untuk mengidentifikasi transaksi tiap unit usaha serta menelusuri eksistensi transaksi dalam akun-akun laporan keuangan. Hasil analisis berhasil mengidentifikasi beberapa kelemahan laporan keuangan yang telah disusun oleh Bendahara Unit. Langkah berikutnya adalah melakukan *mapping* akun laporan keuangan BUMDes dengan Standar Akuntansi ETAP.

PEMBAHASAN HASIL KEGIATAN

Hasil revidi laporan keuangan sebelumnya

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, dapat dilihat bahwa laporan keuangan yang selama ini dibuat terdiri dari:

- Laporan laba rugi
- Neraca

Kemudian, apabila merujuk pada PSAK ETAP, BUMDes seharusnya telah menyusun laporan keuangan yang terdiri dari:

- Laporan posisi keuangan/neraca
- Laporan laba rugi
- Laporan perubahan ekuitas
- Laporan arus kas
- Catatan atas laporan keuangan

Hasil survey dokumen, wawancara dan diskusi dengan pihak-pihak terkait menemukan beberapa kelemahan dalam pelaporan keuangan BUMDes

Tirta Mandiri. *Pertama*, format laporan keuangan belum sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi yang berlaku. *Kedua*, akun-akun laporan keuangan, terutama akun laporan laba rugi belum lengkap, dan Unit Toko Desa dan Unit Ponggok Ciblon tidak melakukan input transaksi ke aplikasi akuntansi, dikarenakan terjadinya penggantian pegawai yang menangani pembukuan. Pegawai yang keluar tidak melakukan serah terima kepada penggantinya. *Ketiga*, nama akun yang tidak seragam dan tidak konsisten antar periode dan antar Unit Usaha. *Keempat*, pengukuran masing-masing akun masih menggunakan konsep biaya historis. *Kelima*, BUMDes belum mengakui penyusutan aset tetap selain tanah. Alasan tidak dilakukannya penyusutan karena pegawai bagian akuntansi belum memahami konsep penyusutan dan bagaimana menghitung penyusutan. *Keenam*, laporan keuangan BUMDes belum menyajikan aset tidak berwujud, seperti hak pengelolaan umbul.

Lebih lanjut, BUMDes Tirta Mandiri belum membakukan kebijakan akuntansinya. Kebijakan akuntansi ini sangat penting sebagai pedoman pelaporan keuangan, karena kebijakan akuntansi menjadi dasar dalam melaksanakan akuntansi dan menyusun serta menyajikan laporan keuangan. Selain itu, kebijakan akuntansi juga sebagai pedoman pelaksanaan bagi pelaksana fungsi akuntansi dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan akuntansi keuangan BUMDes yang meliputi: (1) Konsep dasar, prinsip dan metode akuntansi, (2) Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa keuangan, (3) Sebagai sumber rujukan (referensi) dalam memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi dan perlakuan akuntansi terhadap suatu transaksi atau kegiatan BUMDes agar terjamin adanya konsistensi dan keseragaman dalam pelaksanaan akuntansi BUMDes.

Oleh karena itu, salah satu kegiatan abdimas ini menetapkan target yang harus dilaksanakan, yaitu menyusun kebijakan akuntansi BUMDes sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan BUMDes. Kebijakan akuntansi tersebut mencakup: (1) Karakteristik Umum, memuat komponen lengkap laporan keuangan yang harus disusun dan prinsip-prinsip akuntansi.

Kebijakan Akuntansi

1. Karakteristik Umum

Karakteristik umum memuat dua hal berikut:

- a. Komponen Laporan Keuangan Lengkap
Laporan keuangan konsolidasian yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

- 1) laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode;

- 2) laporan laba rugi selama periode;
 - 3) laporan perubahan ekuitas selama periode;
 - 4) laporan arus kas selama periode;
 - 5) catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain;
- b. Penyajian Secara Wajar dan Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan
 - 1) Laporan keuangan BUMDes menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas BUMDes. Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa lain, dan kondisi sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan.
 - 2) Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sehingga menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. BUMDes membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SAK ETAP dalam catatan atas laporan keuangan.

2. Prinsip-Prinsip Akuntansi

- a. Periode Akuntansi
Periode akuntansi dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember untuk tahun yang bersangkutan.
- b. Kelangsungan Usaha
BUMDes menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha.
- c. Dasar Akrual
BUMDes menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Transaksi atau peristiwa bisnis, diakui pada saat kejadian (bukan saat kas atau setara kas diterima) dan dicatat serta disajikan dalam laporan keuangan pada periode kejadiannya. Basis akrual bertujuan untuk mengaitkan secara langsung dan bersamaan antara pendapatan dan beban yang timbul untuk memperoleh pendapatan.
- d. Materialitas
BUMDes menyajikan secara terpisah kelompok pos sejenis yang material. BUMDes menyajikan secara terpisah kelompok pos yang mempunyai sifat atau fungsi berbeda kecuali pos tersebut tidak material.
- e. Mata Uang Pelaporan dan Pembulatan

Mata uang yang digunakan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan adalah Rupiah (Rp). Untuk pencatatan transaksi dilakukan pembulatan ke atas apabila sama atau lebih besar dari Rp0,50 dan pembulatan ke bawah apabila lebih kecil dari Rp0,50. Sedangkan untuk penyajian di laporan keuangan, kecuali dinyatakan secara khusus, dibulatkan menjadi dan disajikan dalam Rupiah yang terdekat.

f. Frekuensi Pelaporan

BUMDes menyajikan laporan keuangan lengkap (termasuk informasi komparatif) setidaknya secara tahunan. Jika akhir periode pelaporan BUMDes berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek daripada periode satu tahun, sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, maka BUMDes mengungkapkan:

- 1) alasan penggunaan periode pelaporan yang lebih panjang atau lebih pendek; dan
- 2) fakta bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian tidak dapat dibandingkan secara keseluruhan.

g. Informasi Komparatif

Informasi kuantitatif diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan konsolidasian periode sebelumnya diungkapkan kembali jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

h. Konsistensi Penyajian

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode dilakukan secara konsisten. Kecuali setelah terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas atau mengkaji ulang atas laporan keuangan, terlihat secara jelas bahwa penyajian atau pengklasifikasian yang lain akan lebih tepat untuk digunakan dengan mempertimbangkan kriteria untuk penentuan dan penerapan kebijakan akuntansi dalam SAK ETAP

i. Pembedaan Aset Lancar dan Tidak Lancar serta Liabilitas Jangka Pendek dan Jangka Panjang

BUMDes menyajikan aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi yang terpisah dalam laporan posisi keuangan, kecuali penyajian berdasarkan likuiditas

memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan. Jika pengecualian tersebut diterapkan, maka BUMDes menyajikan seluruh aset dan liabilitas berdasarkan urutan likuiditas. BUMDes mengungkapkan jumlah yang diharapkan dapat dipulihkan atau diselesaikan setelah lebih dari dua belas bulan untuk setiap pos aset dan liabilitas yang menggabungkan jumlah yang diharapkan akan dipulihkan atau diselesaikan:

- 1) tidak lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan; dan
- 2) lebih dari dua belas bulan setelah periode pelaporan.

j. Penggunaan Estimasi

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi nilai aset dan liabilitas yang dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan, serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

k. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas terdiri dari kas tunai, cek, dan simpanan di bank yang sewaktu-waktu bisa dicairkan.

3. Kebijakan Akuntansi yang Penting

Kas dan Setara Kas

Rujukan PSAK: PSAK ETAP tahun 2009

Definisi: Kas dan Setara Kas terdiri dari saldo kas di tangan (*cash on hand*), rekening giro bank (*demand deposits*), dan setara kas.

Kas di tangan berupa uang kertas, uang logam dan cek tunai baik yang berada di Kantor Pusat maupun di SBU/Kantor Cabang. Rekening giro bank merupakan dana BUMDes yang berada di Bank yang dapat ditarik setiap saat untuk mendanai operasional BUMDes. Cerukan (*bank overdraft*) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas BUMDes dan termasuk komponen kas dan setara kas.

Setara kas (*cash equivalent*) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek (tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehannya) dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko

perubahan nilai yang tidak signifikan. Setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Investasi dalam bentuk saham tidak termasuk setara kas, kecuali substansi investasi saham tersebut adalah setara kas, misalnya, saham preferen yang diperoleh dalam suatu periode singkat dari jatuh temponya dan tanggal penebusan telah ditentukan.

Pengakuan

Kas diakui dan dicatat oleh BUMDes jika memenuhi kriteria tersedia dan sewaktu-waktu siap untuk digunakan (*readily available*), dan tidak ada pembatasan ketika akan digunakan (*free restrictions*).

Pengukuran

Kas dan setara kas diukur sesuai dengan nilai nominalnya. Untuk setara kas yang nilai nominal dan nilai wajarnya berbeda sangat signifikan, maka pengukuran setara kas tersebut adalah nilai wajarnya.

Penyajian

Kas dan setara kas disajikan sebagai salah satu aset lancar yang dimiliki BUMDes. Untuk kas yang dibatasi penggunaannya (*restricted cash*) disajikan sebagai aset lancar jika akan dipergunakan untuk pembayaran liabilitas jangka pendek, dan disajikan sebagai aset tidak lancar jika akan dipergunakan untuk pembayaran liabilitas jangka panjang. Cerukan pada dasarnya disajikan sebagai pinjaman bank pada liabilitas jangka pendek. Saling hapus (*offsetting*) atas cerukan diperkenankan hanya jika BUMDes mempunyai saldo kas yang cukup dalam rekening lain di bank yang sama dimana terjadi cerukan tersebut.

Pengungkapan

BUMDes mengungkapkan:

- Komponen kas dan setara kas
- Kebijakan dalam menentukan komponen kas dan setara kas.
- Jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak dapat digunakan oleh kelompok usaha, beserta pendapat manajemen.
- Informasi tambahan yang relevan yang mungkin berguna dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas BUMDes, seperti jumlah keseluruhan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Piutang

Rujukan PSAK: PSAK ETAP tahun 2009

Definisi: Piutang usaha adalah jumlah yang terutang dari pelanggan untuk pengakuan pendapatan pada penjualan barang dan jasa dalam kegiatan

usaha biasa. Piutang non-usaha adalah piutang yang dihasilkan dari transaksi selain penjualan barang dan jasa, dalam kegiatan usaha biasa. Jika piutang diperkirakan dapat ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal jika lebih panjang), piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang disajikan sebagai aset tidak lancar.

Pengakuan

Piutang diakui pada saat:

- BUM Des telah memiliki hak tagih baik karena penyerahan barang atau jasa maupun memberikan pinjaman.
- Nilai/jumlahnya dapat diukur secara andal.

Pengukuran

Pada saat perolehan piutang diakui sebesar nilai nominal atau nilai perolehan. Piutang dalam bentuk valuta asing dikonversi ke rupiah pada tanggal transaksi. Pada saat akhir tahun buku piutang dalam bentuk valuta asing dikonversi ke nilai rupiah pada tanggal pelaporan. Kurs konversi yang digunakan adalah nilai tengah bank Indonesia.

Penyajian

Piutang disajikan dalam neraca sebagai piutang jangka pendek maupun piutang jangka Panjang tergantung tanggal jatuh temponya. Piutang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang disajikan dalam aset lancar, sedangkan piutang dengan jatuh tempo lebih dari 12 bulan disajikan sebagai piutang jangka panjang. Piutang diukur nilai wajar yang dapat direalisasi yaitu sebesar nominal dikurangi cadangan piutang tak tertagih. Besaran piutang tak tertagih diestimasi sebesar 0,5% (setengah persen) dari saldo akhir piutang.

Pengungkapan

BUMDes mengungkapkan piutang sebagai berikut:

- Rincian piutang per jenis/klasifikasi piutang
- Informasi saldo awal, mutasi tambah dan kurang, serta saldo akhir piutang
- Kebijakan pencadangan piutang.
- Nilai bersih yang dapat direalisasi.

Persediaan

Rujukan PSAK: PSAK ETAP Tahun 2009

Definisi: Persediaan adalah aset:

- Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa;
- Barang dalam proses produksi; atau
- Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam pemberian jasa.

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat telah terjadi perpindahan hak kepemilikan.

Pengukuran

Persediaan diukur berdasarkan nilai mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan dan menjual. Biaya perolehan persediaan mencakup seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya yang terjadi untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi sekarang.

Biaya pembelian persediaan meliputi harga beli, bea impor, pajak lainnya (kecuali yang kemudian dapat direstitusi kepada otoritas pajak), biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan, dan jasa. Diskon dagang, potongan, dan lainnya yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian.

Penyajian/Pengungkapan

BUMDes mengungkapkan:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan,
- b. Total jumlah tercatat persediaan dan jumlah nilai tercatat menurut klasifikasi yang sesuai bagi BUMDes,
- c. Jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan,
- d. Jumlah setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan,
- e. Nilai tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan kewajiban (diagunkan).

Aset Tetap

Rujukan PSAK: PSAK ETAP Tahun 2009

Definisi: Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Pengakuan

Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a. Besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke BUMDes;
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset tetap dicatat pada saat perolehannya yaitu pada saat hak kepemilikan sudah beralih kepada BUMDes (diserahkan) dan siap untuk dipergunakan.

Pengukuran

BUMDes menetapkan kebijakan berikut:

- a. Aset tetap pada awalnya dicatat berdasarkan nilai perolehan.

- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas/setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan ke aset pada saat pertama kali. Biaya perolehan meliputi harga beli termasuk bea impor, pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lain. Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen dan estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset.
- c. Penentuan harga perolehan aset tetap sesuai dengan cara perolehannya adalah sebagai berikut:

- 1) Perolehan dengan kredit

Harga perolehan untuk aset yang diperoleh secara kredit dicatat sebesar harga tunai, sedangkan perbedaannya dicatat sebagai beban bunga selama periode kredit, kecuali bila biaya kredit tersebut dikapitalisasi.

- 2) Perolehan gabungan

Harga perolehan dari masing-masing aset yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

- 3) Pertukaran

Harga perolehan aset pertukaran adalah nilai wajar aset yang dilepas atau yang diperoleh, mana yang lebih andal, ekuivalen dengan nilai wajar aset yang dilepaskan setelah memperhatikan ada tidaknya unsur komersial dalam pertukaran tersebut. Jika terdapat unsur komersial maka laba rugi pertukaran akan diakui.

- 4) Donasi/Sumbangan

Harga perolehan aset yang diperoleh dari sumbangan dicatat sebesar harga taksiran atau harga pasar yang layak.

- d. Kebijakan pengakuan awal/kapitalisasi aset tetap adalah:

- 1) Pengeluaran untuk perolehan aset yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun dengan nilai yang ditentukan oleh manajemen setiap unit aset, atau pengeluaran untuk aset yang masa gunanya satu tahun atau kurang, diperlakukan sebagai revenue expenditure dan dibebankan langsung sebagai beban periode tahun pengeluarannya atau dicatat sebagai biaya ditangguhkan.

- 2) Aset tersebut dicatat dalam daftar inventaris (kecil) secara ekstra komptabel pada fungsi pengelola/penanggung jawabnya untuk keperluan pengendalian.

- 3) Pengeluaran untuk perolehan aset dengan nilai yang ditentukan oleh manajemen atau lebih dan bermasa guna lebih dari satu tahun diperlakukan sebagai capital expenditure dan dicatat sebagai aset tetap yang kemudian disusutkan selama masa manfaatnya.
 - e. Pengeluaran setelah pengakuan awal aset tetap Biaya-biaya lain yang terjadi setelah pengakuan awal yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset tetap jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke BUMDes dan biaya-biaya lain tersebut dapat diukur secara handal.
Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasi dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasi. Sedangkan biaya-biaya lain yang tidak memberikan manfaat ekonomis di masa depan misalnya beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya.
 - f. Setelah diakui sebagai aset tetap, BUMDes menggunakan model biaya dalam pencatatan aset BUMDes sehingga aset tetap disajikan sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset.
 - g. Penyusutan aset tetap
 - 1) Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Alokasi penyusutan dicatat sebagai beban BUMDes pada periode akuntansi.
 - 2) Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap berwujud yang dimiliki oleh BUMDes dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dengan masa manfaat yang terbatas dan lebih dari satu tahun.
 - 3) Aset tetap tanah tidak disusutkan karena mempunyai masa manfaat yang tidak terbatas.
 - 4) Penyusutan aset tetap dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai residu.
Penyusutan aset dilakukan secara bulanan dengan tarif berdasarkan umur ekonomis yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi (SKD).
 - a) Bangunan/Gedung dan Prasarana
 - b) Mesin dan Instalasi
 - c) Komputer
 - d) Truk, Alat Mekanik, dan Alat Berat
 - e) Kendaraan
 - f) Inventaris dan Peralatan
 - 5) Beban penyusutan aset tetap dialokasikan kepada fungsi/unit kerja yang memperoleh manfaat dari aset tetap yang bersangkutan dan mulai dibebankan pada bulan berikutnya dari tanggal perolehan aset tetap.
 - h. Penghapusbukuan aset tetap.
Penghapusbukuan aset tetap adalah penghapusan nilai aset tetap dari catatan akuntansi BUMDes karena rusak dan tidak dapat dipakai lagi atau tidak berfungsi lagi. Penghapusbukuan aset tetap dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Direksi (SKD) setelah mendapat persetujuan dari komisaris atau pemegang saham.
 - i. Keuntungan/kerugian aset tetap
Keuntungan atau kerugian akibat pengeluaran aset tetap dicatat pada rekening pendapatan/biaya lain-lain di luar usaha yaitu:
 - 1) Kerugian penghapusan aset dicatat sebesar nilai buku ditambah biaya-biaya dalam rangka penghapusan,
 - 2) Keuntungan/kerugian penjualan aset tetap dicatat sebesar harga penjualan dikurangi nilai buku aset tetap dan biaya penjualannya.
 - j. Aset tetap yang tidak digunakan lagi atau dijual, nilai tercatat dikeluarkan dari laporan keuangan, dan keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi.
- ### Penyajian/Pengungkapan
- BUMDes mengungkapkan, untuk setiap kelompok aset tetap:
- a. Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto,
 - b. Metode penyusutan yang digunakan,
 - c. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan,
 - d. Jumlah tercatat dan akumulasi penyusutan,
 - e. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode,
 - f. Keberadaan dan jumlah restriksi atas hak milik, dan aset tetap yang dijaminkan untuk utang,
 - g. Jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam pembangunan,
 - h. Jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap,
- ### Aset Tidak Berwujud
- Rujukan: PSAK ETAP Tahun 2009
Definisi: Aset tidak berwujud adalah aset nonmoneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Suatu aset dikategorikan teridentifikasi jika:
- a. Dapat dipisahkan, yaitu dapat dipisahkan atau dibedakan dari entitas dan dijual, dialihkan, dilisensikan atau ditukarkan, baik secara individu

secara individual atau bersama dengan kontrak terkait, aset teridentifikasi, atau liabilitas teridentifikasi, terlepas apakah entitas bermaksud untuk melakukan hal tersebut; atau

- b. Timbul dari hak kontraktual atau hak legal lain, terlepas apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lain.

Aset tidak berwujud tidak termasuk:

- a. efek (surat berharga); atau
- b. hak atas mineral dan cadangan mineral, misalnya minyak, gas alam dan sumber daya yang tidak dapat diperbarui lainnya.

Pengakuan

Aset tidak berwujud diakui jika, dan hanya jika:

- a. Kemungkinan besar BUMDes akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut; dan
- b. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal.

Pengukuran

Pengukuran aset tidak berwujud sebagai berikut:

- a. Aset tidak berwujud pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan.
- b. Biaya perolehan aset tidak berwujud terdiri dari:
 - 1) Harga beli, termasuk biaya masuk dan pajak pembelian yang tidak dapat direstitusi, setelah dikurangi diskon dan rabat; dan
 - 2) Semua biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan.
- c. Pengeluaran untuk aset tidak berwujud diakui sebagai beban pada saat terjadinya, kecuali:
 - 1) Pengeluaran itu merupakan bagian dari biaya perolehan aset tidak berwujud yang memenuhi kriteria pengakuan
 - 2) Sesuatu yang diperoleh melalui suatu kombinasi bisnis dan tidak dapat diakui sebagai aset tidak berwujud. Jika demikian halnya, maka pengeluaran tersebut merupakan bagian dari goodwill pada tanggal akuisisi.
- d. Pengeluaran atas pos aset tidak berwujud yang awalnya diakui oleh BUMDes sebagai beban tidak diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tidak berwujud di kemudian hari.
- e. Setelah pengakuan awal, maka BUMDes memilih model biaya dimana aset tidak berwujud dicatat pada biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Aset tidak berwujud yang memiliki umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi.
- f. Aset tidak berwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi menggunakan metode garis lurus dengan mempertimbangkan umur manfaat tanpa nilai residunya.

g. Umur manfaat aset tidak berwujud yang timbul dari hak kontraktual atau hak legal lain tidak lebih lama dari masa hak kontraktual atau hak legal lain tersebut.

h. Umur manfaat aset tidak berwujud berupa software adalah 5 tahun, sedangkan aset tidak berwujud lainnya selama 10 tahun.

Penyajian/Pengungkapan

BUMDes mengungkapkan hal berikut untuk setiap kelompok aset tidak berwujud, serta:

- a. Metode amortisasi yang digunakan untuk aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas;
- b. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode; dan
- c. Rekonsiliasi atas jumlah tercatat pada awal dan akhir periode.

Utang

Rujukan PSAK: PSAK ETAP Tahun 2009

Definisi: Utang usaha adalah kewajiban BUM Des kepada pihak ketiga yang dibayar dengan cara menyerahkan aktiva atau jasa dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat dari transaksi di masa lalu. Utang dikelompokkan menjadi utang usaha dan utang non-usaha. Utang usaha adalah utang yang timbul dari kegiatan utama perusahaan. Sedangkan utang non-usaha adalah semua utang/kewajiban yang timbul dari kegiatan non-usaha.

Utang dibagi menjadi utang jangka pendek dan utang jangka Panjang. Utang yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan atau kurang diklasifikasikan sebagai utang jangka pendek, sedangkan utang yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan diklasifikasikan sebagai utang jangka Panjang.

Pengakuan

Utang usaha diakui ketika BUMDes telah menerima barang atau jasa dan telah ditagih melalui faktur atau secara formal sudah disepakati dengan pemasok.

Pengukuran

Pada saat pengakuan awal, BUMDes mengukur utang usaha pada nilai wajarnya. Setelah pengakuan awal, BUMDes mengukur seluruh utang usaha pada biaya perolehan. Biaya perolehan diamortisasi adalah jumlah liabilitas yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Penyajian

Utang usaha disajikan pada laporan posisi keuangan (neraca) dan diklasifikasikan sebagai jangka pendek dan jangka panjang dengan acuan sebagai berikut:

- a. Suatu utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika:
- 1) BUMDes mengharapkan akan menyelesaikan utang usaha tersebut dalam siklus operasi normalnya;
 - 2) BUMDes memiliki utang usaha tersebut untuk tujuan diperdagangkan;
 - 3) Utang usaha tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau
 - 4) BUMDes tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian utang usaha selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.
- b. BUMDes mengklasifikasikan utang usaha yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang.

Pengungkapan

Untuk setiap utang usaha, BUMDes mengungkapkan:

- a. Informasi mengenai cakupan dan sifat utang usaha, termasuk persyaratan dan kondisi yang bersifat signifikan yang dapat memengaruhi jumlah, waktu, dan tingkat kepastian arus kas di masa depan; dan
- b. Kebijakan dan metode akuntansi yang digunakan, termasuk kriteria pengakuan dan dasar pengukuran yang diterapkan.

Ekuitas

Rujukan : PSAK ETAP tahun 2009 dan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, PSAK No. 1 (revisi 2009) – Penyajian Laporan Keuangan

Definisi: Ekuitas adalah hak residual atas aktiva BUMDes setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas terdiri atas:

- a. Setoran Modal terdiri dari:
 - 1) Penyertaan Modal Desa
 - 2) Penyertaan modal Masyarakat
- b. Laba yang tidak dibagi
 - 1) Laba yang tidak dibagi
 - 2) Laba yang dicadangkan

Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan dan pengukuran ekuitas ditentukan pada saat telah menjadi hak BUM Des.

Penyajian

- a. Modal disajikan dalam neraca setelah liabilitas.
- b. BUMDes mengungkapkan ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam BUMDes sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan paeraturan perundangan dan akta pendirian yang berlaku.
- c. BUMDes mengungkapkan unsur ekuitas dengan pengelompokan sebagai modal disetor, saldo

laba, selisih penilaian kembali aktiva tetap, dan modal sumbangan.

Pengungkapan

BUMDes mengungkapkan hal-hal berikut dalam laporan posisi keuangan (neraca) atau laporan perubahan ekuitas, atau catatan atas laporan keuangan:

- a. Jumlah modal dasar;
- b. Perubahan laba ditahan; dan
- c. Cadangan laba ditahan.

Pendapatan

Rujukan PSAK: PSAK ETAP 2009

Definisi: Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Pengakuan

Pendapatan utama BUMDes berasal dari penjualan jasa dan penjualan barang.

- a. Penjualan jasa
 - 1) Jika hasil transaksi yang terkait dengan penjualan jasa dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada akhir periode pelaporan. Hasil transaksi dapat diestimasi secara andal jika seluruh kondisi berikut ini dipenuhi:
 - a) jumlah pendapatan dapat diukur secara andal;
 - b) kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas;
 - c) tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal; dan
 - d) biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur secara andal
 - 2) Jika hasil transaksi terkait dengan penjualan jasa tidak dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan diakui hanya yang berkaitan dengan beban yang telah diakui yang dapat dipulihkan.
- b. Penjualan barang
Pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut dipenuhi:
 - 1) BUMDes telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli;
 - 2) BUMDes tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang maupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual;

- 3) jumlah pendapatan dapat diukur secara andal
- 4) kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke BUMDes; dan
- 5) biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur secara andal

Pengukuran

Pendapatan dari penjualan jasa dan penjualan barang diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dikurangi dengan diskon perdagangan atau rabat volume yang diperbolehkan oleh BUMDes. Imbalan ini biasanya berbentuk kas atau setara kas dan jumlah pendapatan adalah sebesar kas atau setara kas yang diterima.

Pengungkapan

BUMDes mengungkapkan:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan termasuk metode yang digunakan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa,
- b. Jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode tersebut termasuk pendapatan dari penjualan jasa, barang, bunga dan dividen
- c. Jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran jasa atau barang yang tercakup dalam setiap kategori signifikan,
- d. Setiap liabilitas kontigensi dan aset kontigensi yang dapat timbul seperti jaminan, klaim, denda dan kemungkinan kerugian lain.

Beban

Rujukan: PSAK ETAP Tahun 2009

Definisi: Beban mencakup baik beban maupun kerugian yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas BUMDes yang biasa dan biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aset seperti kas dan setara kas, persediaan dan aset tetap. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas BUMDes yang biasa meliputi beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Kerugian mencerminkan berkurangnya manfaat ekonomi, dan pada hakikatnya tidak berbeda dari beban lain. Contoh kerugian adalah adanya bencana alam dan kerugian karena pelepasan aset tetap.

Pengakuan dan Pengukuran

Secara umum beban diakui BUMDes:

- a. Jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal.

- b. atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh (*matching of costs with revenue*).
- c. atas dasar prosedur alokasi yang rasional dan sistematis jika manfaat ekonomi diharapkan timbul selama beberapa periode akuntansi dan hubungannya dengan penghasilan hanya dapat ditentukan secara luas atau tidak langsung
- d. jika tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau kalau sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak memenuhi syarat, atau tidak lagi memenuhi syarat untuk diakui dalam neraca sebagai aset.

Penyajian dan Pengungkapan

BUMDes menyajikan seluruh pos beban yang diakui dalam suatu periode dalam laporan laba rugi.

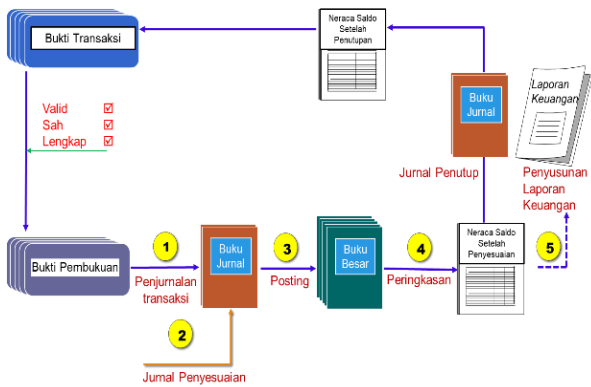
LAPORAN KEUANGAN UNIT USAHA dan KANTOR PUSAT

1. Jenis dan Bentuk Laporan

Jenis laporan yang dibuat oleh masing-masing unit usaha dan Kantor Pusat adalah Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi dan Laporan Arus Kas. Contoh laporan posisi keuangan (Neraca), laporan laba rugi, dan laporan arus kas masing-masing unit usaha dan Kantor Pusat terdapat pada Lampiran.

2. Prosedur Penyusunan

Kode akun yang digunakan oleh unit usaha dan Kantor Pusat pada dasarnya menggunakan klasifikasi yang sama meskipun rincian atas masing-masing klasifikasi bisa berbeda terutama untuk akun pendapatan. Pada setiap akhir bulan, setiap unit usaha menyusun laporan kinerja unit usaha berupa Laporan Laba Rugi dan disampaikan ke Kantor Pusat BUMDes. Pada setiap akhir periode, masing-masing unit usaha dan Kantor Pusat menyusun Laporan Perubahan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi. Berdasarkan laporan posisi keuangan (neraca) dan laporan laba rugi gabungan, maka Kantor Pusat menyusun laporan arus kas. Bentuk laporan keuangan BUMDes Tirta Mandiri kami sajikan dalam lampiran artikel ini.



Gambar 1. Siklus Akuntansi di setiap Unit Usaha dan Kantor Pusat untuk BUMDes Tirta Mandiri

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini ditujukan untuk membantu BUMDes Tirta Mandiri untuk menyusun kebijakan akuntansi berdasarkan SAK ETAP. Dasar kegiatan ini adalah permintaan kebutuhan pendampingan dalam rangka memperbaiki penyusunan laporan keuangan dari Direktur BUMDes Tirta Mandiri. Untuk mencapai tujuan kegiatan, Tim melakukan survey pendahuluan, mengumpulkan dokumen, wawancara dan diskusi terpimpin untuk mengumpulkan bahan dan analisis kondisi pelaporan keuangan BUMDes Tirta Mandiri. Hasil analisis awal menunjukkan beberapa kelemahan dalam pelaporan keuangan. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, kami menetapkan prioritas kegiatan yang segera dilaksanakan yaitu menyusun pedoman kebijakan akuntansi yang menjadi rujukan dalam pelaporan keuangan BUMDes. Kebijakan akuntansi yang disusun Tim Pengmas terdiri dari karakteristik umum pelaporan keuangan, prinsip dasar pelaporan keuangan, kebijakan akuntansi penting dan bentuk laporan keuangan yang dihasilkan oleh BUMDes Tirta Mandiri. Dengan adanya pedoman kebijakan akuntansi tersebut, pegawai bagian keuangan memiliki pedoman untuk menggunakan aturan akuntansi, nama dan kode akun, bentuk laporan keuangan dan pengukuran dan penyajian setiap informasi keuangan dari BUMDes Tirta Mandiri.

PUSTAKA

Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. Kerangka Konseptual Akuntansi. IAI Global, Jakarta.
Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. Standar Akuntansi Keuangan ETAP. IAI Global, Jakarta.

Lampiran 1
Laporan Laba Rugi Unit Usaha



Desa Ponggok
Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri
LAPORAN LABA RUGI

Untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Januari 2018

(dalam rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Januari 2018	s.d 31 Januari 2018
1	2		3
1	Pendapatan		
2	Pendapatan Tiket	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
3	Pendapatan Wahana	Rp -	Rp -
4	Pendapatan Penjualan	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
5	Pendapatan Pengelolaan Air Bersih	Rp -	Rp -
6	Pendapatan Sewa	Rp -	Rp -
7	Pendapatan Jasa Pelayanan	Rp -	Rp -
8	Pendapatan Rupa-rupa	Rp -	Rp -
9	Total Pendapatan	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
10	Harga Pokok Penjualan		
11	Harga Pokok Penjualan Barang Dagangan	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000
12	Harga Pokok Penjualan Makanan dan Minuman	Rp -	Rp -
13	Total Harga Pokok Penjualan	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000
14	LABA (RUGI) KOTOR	Rp 16.500.000	Rp 16.500.000
15	Beban		
16	Beban Administrasi dan Umum	Rp 7.250.000	Rp 7.250.000
17	Beban Wahana	Rp -	Rp -
18	Beban Pemasaran	Rp -	Rp -
19	Total Beban	Rp 7.250.000	Rp 7.250.000
20	LABA (RUGI) OPERASI	Rp 9.250.000	Rp 9.250.000
21	Pendapatan dan Beban Lain-lain		
22	Pendapatan Lain-lain	Rp -	Rp -
23	Beban Lain-lain	Rp -	Rp -
24	Total Pendapatan dan Beban Lain-lain	Rp -	Rp -
	LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM BAGI HASIL	Rp 9.250.000	Rp 9.250.000
	BAGI HASIL KE PEMILIK	Rp -	Rp -
	Laba (RUGI) BERSIH SETELAH BAGI HASIL KE PEMILIK	Rp 9.250.000	Rp 9.250.000

Kabupaten Klaten, 31 Desember 2018
Direktur BUMDes

.....
NIK

Lampiran 2
Laporan Perubahan Ekuitas



Desa Ponggok
Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

Nomor Urut	Uraian	2018
1	2	3
1	PENYERTAAN MODAL	
2	Penyertaan Modal Awal	Rp -
3	Penambahan Investasi periode berjalan:	
4	Penyertaan Modal Desa	Rp 100.000.000
5	Penyertaan Modal Masyarakat	Rp -
6	Penyertaan Modal Akhir	Rp 100.000.000
7	LABA DITAHAN	
8	Laba Ditahan Awal	Rp 39.750.000
9	Laba (Rugi) periode berjalan	Rp 9.250.000
10	Bagi Hasil Penyertaan:	
11	Bagi Hasil Penyertaan Modal Desa	Rp -
12	Bagi Hasil Penyertaan Modal Masyarakat	Rp -
13	Laba Ditahan Akhir	Rp 49.000.000
14	EKUITAS AKHIR	Rp 149.000.000

Kabupaten Klaten, 31 Desember 2018

Direktur BUMDes

.....

NIK

Lampiran 3
Laporan Posisi Keuangan



Desa Ponggok
Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
Per 31 Desember 2018 dan 2017
(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	2		4
1	ASET		
2	Aset Lancar		
3	Kas Tunai	Rp 1.000.000	Rp 1.250.000
4	Kas di Bank	Rp 121.500.000	Rp 125.000.000
5	Kas Kecil (Petty Cash)	Rp -	Rp -
6	Piutang Usaha	Rp -	Rp -
7	Penyisihan Piutang Usaha Tak Tertagih	Rp -	Rp -
8	Piutang kepada Pegawai	Rp -	Rp -
9	Penyisihan Piutang kepada Pegawai Tak Tertagih	Rp -	Rp -
10	Persediaan Barang Dagangan	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
11	Persediaan Makanan dan Minuman	Rp -	Rp -
12	Persediaan Ikan Hias	Rp -	Rp -
13	Persediaan ATK	Rp -	Rp -
14	Perlengkapan	Rp -	Rp -
15	Sewa Dibayar Dimuka	Rp -	Rp -
16	Asuransi Dibayar Dimuka	Rp -	Rp -
17	PPh 25	Rp -	Rp -
18	PPN Masukan	Rp -	Rp -
19	Piutang Desa	Rp -	Rp -
20	Aset Lancar Lainnya	Rp -	Rp -
21	RK Pusat	Rp 15.500.000	Rp -
22	Jumlah Aset Lancar	Rp 140.500.000	Rp 128.750.000
23	Investasi		
24	Investasi dalam Deposito	Rp -	Rp -
25	Investasi Lainnya	Rp -	Rp -
26	Jumlah Investasi	Rp -	Rp -
27	Aset Tetap		
28	Tanah	Rp -	Rp -
29	Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp -
30	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp -
31	Peralatan dan Meubelair	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000
32	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Meubelair	Rp (15.000.000)	Rp (12.500.000)
33	Kendaraan	Rp -	Rp -
34	Akumulasi Penyusutan Kendaraan	Rp -	Rp -
35	Aset Tetap Lainnya	Rp -	Rp -
36	Jumlah Aset Tetap	Rp 10.000.000	Rp 12.500.000
37	TOTAL ASET	Rp 150.500.000	Rp 141.250.000

38	Kewajiban		
39	Kewajiban Jangka Pendek		
40	Utang Usaha	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
41	PPN Keluaran	Rp -	Rp -
42	PPh 21	Rp -	Rp -
43	PPh 23	Rp -	Rp -
44	PPh 29	Rp -	Rp -
45	Utang Gaji dan Tunjangan	Rp -	Rp -
46	Utang Listrik	Rp -	Rp -
47	Utang Telepon	Rp -	Rp -
48	Utang Utilitas Lainnya	Rp -	Rp -
49	Utang kepada Pihak Ketiga Jk. Pendek	Rp -	Rp -
50	Utang Dana Titipan Walker	Rp -	Rp -
51	Utang Dana Titipan Warior	Rp -	Rp -
52	Utang Dana Titipan Toilet RW 1	Rp -	Rp -
53	Utang Dana Titipan Toilet RW 2	Rp -	Rp -
54	Utang Dana Titipan Toilet RW 3	Rp -	Rp -
55	Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp -	Rp -
56	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
57	Kewajiban Jangka Panjang		
58	Utang kepada Pihak Ketiga Jk. Panjang	Rp -	Rp -
59	Utang Ke Bank	Rp -	Rp -
60	Utang Jangka Panjang Lainnya	Rp -	Rp -
61	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -
62	JUMLAH KEWAJIBAN	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
63	Ekuitas		
64	Ekuitas Akhir	Rp 149.000.000	Rp 139.750.000
65	RK Unit Usaha	Rp -	Rp -
66	JUMLAH EKUITAS	Rp 149.000.000	Rp 139.750.000
67	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Rp 150.500.000	Rp 141.250.000

Kabupaten Klaten, 31 Desember 2018

Direktur BUMDes

.....
 NIK